

STARTING A BUSINESS



Indikator Jenis Prosedural : Starting Business

<u>Type</u>	<u>Asumsi</u>
Jenis Perusahaan	: Berbentuk PT yang dimiliki oleh 5 orang (pendiri) dan merupakan WNI.
Lokasi	: Jakarta
Skala Perusahaan	: <ul style="list-style-type: none"> • Modal awal : Rp 403.533.205 • Penjualan per tahun : Rp 4.035.332.054 • Jumlah Karyawan : 10-50 karyawan (dalam waktu 1 bulan setelah beroperasi)
Kegiatan	: Bergerak di bidang industri / perdagangan umum
Aset	: Sewa Ruko 2 tingkat dengan biaya sewa Rp 40.353.321 per tahun
Akta Perusahaan	: 10 halaman

Pertanyaan	Jawaban 2016	Usulan Jawaban 2017	Penjelasan/catatan
Reform Update			
<p>1. Apakah ada pembaruan dalam praktek maupun peraturan yang terkait dengan memulai usaha sejak 1 Juni 2015?</p> <p><i>Has there been any reform (in practice or in laws and regulations)</i></p>	-	Ya, pembaruan ini menyederhanakan proses memulai usaha.	<p>1. Revisi Perpres No. 98/ 2014 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) menjadi Izin Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (IUMKM).</p> <p>Cakupan pembaruan dalam Perpres No. 98/ 2014 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil</p>

Pertanyaan	Jawaban 2016	Usulan Jawaban 2017	Penjelasan/catatan
<p><i>related to the process of starting a business SINCE June 1, 2015?</i></p>			<p>:</p> <p>Para pelaku UMKM akan mendapatkan kemudahan untuk berusaha, akses ke perbankan dan permodalan. Di Jakarta Penerbitan Izin Usaha Kecil bisa secara online lewat PTSP (3 jam) dan di Surabaya lewat Surabaya Single Window (3 jam) / PTSP dengan biaya Rp 0. Izin Usaha Kecil menggantikan SIUP, TDP dan izin-izin yang lain.</p> <p>Portal Pelayanan Perizinan di DKI Jakarta : http://pelayanan.jakarta.go.id/</p> <p>Pendaftaran Izin Parsial secara online di Surabaya : http://ssw.surabaya.go.id/</p> <p>Demikian juga untuk Izin Usaha Menengah. Prosedurnya hanya mengajukan perizinan dengan melengkapi berkas-berkas dan mengisi formulir pendaftaran dan langsung mengupload ke website tersebut.</p>
			<p>2. Revisi Permendag no 77 tahun 2013 * untuk pengajuan SIUP dan TDP hanya menggunakan satu form sehingga prosedur <i>starting business</i> berkurang dari</p>

Pertanyaan	Jawaban 2016	Usulan Jawaban 2017	Penjelasan/catatan
			<p>2 menjadi 1 prosedur. Pengajuan izin satu form namun sekaligus menerbitkan 2 izin, yaitu SIUP dan TDP. Prosedur ini juga dapat dilakukan <i>online</i>.</p> <p>*Diharapkan akhir Februari 2016 sudah terbit revisi Permendag no 77 th 2013.</p>
<p>2. Apakah anda mengetahui adanya perubahan (dalam praktek maupun peraturan) tentang proses memulai usaha yang akan dilakukan setelah 1 Juni 2016?</p> <p><i>Are you aware of any reform (in practice or in laws and regulations) related to the process of starting a business that is expected to be adopted PRIOR TO June 1, 2016?</i></p>	-	Belum diketahui peraturan yang akan diperbaharui setelah 1 Juni 2016	-
<p>3. Apakah anda mengetahui adanya perubahan (dalam</p>	-	Ya ada.	Terbentuk RPP Untuk Modal Dasar untuk Perseroan Terbatas dan RPP Pemakaian Nama Perseroan Terbatas

Pertanyaan	Jawaban 2016	Usulan Jawaban 2017	Penjelasan/catatan
<p>praktek maupun peraturan) tentang proses memulai usaha yang sedang dilakukan dan akan diperbaharui setelah 1 Juni 2016?</p> <p><i>Are you aware of any reform (in practice or in laws and regulations) related to the process of starting a business that is ongoing and is expected to be adopted AFTER June 1, 2016?</i></p>			<p>akhir Februari atau awal Maret 2016. Untuk syarat modal dasar pendirian PT ditiadakan dan besarnya diserahkan kembali pada kesepakatan para pemilikinya. Prosedur pemesanan nama perseroan, pengajuan form dan pengesahan serta tata cara pembayaran PNBPN dijadikan satu paket prosedur untuk mengurangi jumlah prosedur dari 4 tahap menjadi 1 tahap saja. Untuk Link silahkan buka www.ahu.go.id</p>
<p>4. Berapa banyak pendaftaran usaha yang anda supervise dalam setahun terakhir?</p> <p><i>How many business registrations did you or your company oversee in the past year?</i></p>	<p>-</p> <p>[data responden]</p>	<p>-</p> <p>[data responden]</p>	<p>-</p>
<p>5. Apakah ada batasan tertentu yang diwajibkan untuk pendaftaran NPPKP</p>	<p>Ya ada.</p>	<p>Ya ada.</p> <p>-</p>	<p>Dilakukan secara <i>online</i>. Landasan hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang

Pertanyaan	Jawaban 2016	Usulan Jawaban 2017	Penjelasan/catatan
<p>(Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)?</p> <p><i>Is there a turnover threshold for mandatory VAT registration?</i></p>			<p>Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 2 ayat 1 PP NOMOR 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan • Pasal 7 PMK 197 Tahun 2013 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai • Pasal 5 PMK 182 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPWP 1 hari, NPPKP 10 hari) • Pasal 4 PMK 197 Tahun 2013 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. • Pasal 6 Perdirjen Pajak Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan

Pertanyaan	Jawaban 2016	Usulan Jawaban 2017	Penjelasan/catatan
			Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 3 Perdirjen Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
Mohon perbarui informasi di bawah ini dengan menggunakan asumsi yang telah ditetapkan di atas. <i>Please update the data below, taking into account the case study assumptions provided in section 1.</i>			
The Business Start-up Process			
6.Modal minimal	Rp 50 juta		Rp 0 , diserahkan kepada para pihak
7.Waktu <i>Time</i>	46 hari	12 hari	
Prosedur 1 : Pay fee for obtaining clearance of company name at a Bank			
Waktu <i>Time</i>	1 hari	1 hari	
Biaya <i>Cost</i>	Rp 200.000	Rp 0	
Detil Prosedur <i>Procedur Details</i>	Pendaftaran dilakukan dengan sistem yang terkomputerisasi. Notaris harus melunasi biaya pembayaran PNPB untuk pengesahan nama sebesar Rp 200 ribu melalui bank persepsi.		

Pertanyaan	Jawaban 2016	Usulan Jawaban 2017	Penjelasan/catatan
	Setelah pembayaran akan mendapatkan tanda terima berkode.		

Pembaruan Prosedur	Landasan Hukum
<ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran hingga pengesahan dilakukan secara online lewat www.ahu.go.id dengan waktu proses 0,5 hari dengan biaya pembayaran PNBPN untuk pengesahan nama sebesar hanya Rp 200 ribu. • Prosedur pemesanan nama perseroan, pengajuan form dan pengesahan serta tata cara pembayaran PNBPN dijadikan satu paket prosedur untuk mengurangi jumlah prosedur dari 4 tahap menjadi 1 tahap saja. • Pengurusan TDP dan SIUP menjadi satu prosedur secara simultan sehingga Memangkas waktu pelayanan menjadi 1 hari. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (pelayanan.jakarta.go.id) • Peraturan Walikota Surabaya No 2 tahun 2016 tentang PTSP • Pergub no 205 tahun 2015 ttg Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara elektronik melalui link : ssw.surabaya.go.id • Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan No. 1 tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, penagihan, pembayaran, dan pelaporan iuran secara <i>online</i> bagi peserta pekerja penerima upah dari badan usaha baru dalam rangka kemudahan berusaha memangkas waktu pelayanan kesehatan dari 10 hari menjadi 1 hari saja.